



EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES*

(BDS) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Safira Koeshrawati

NPM. 21801082214



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

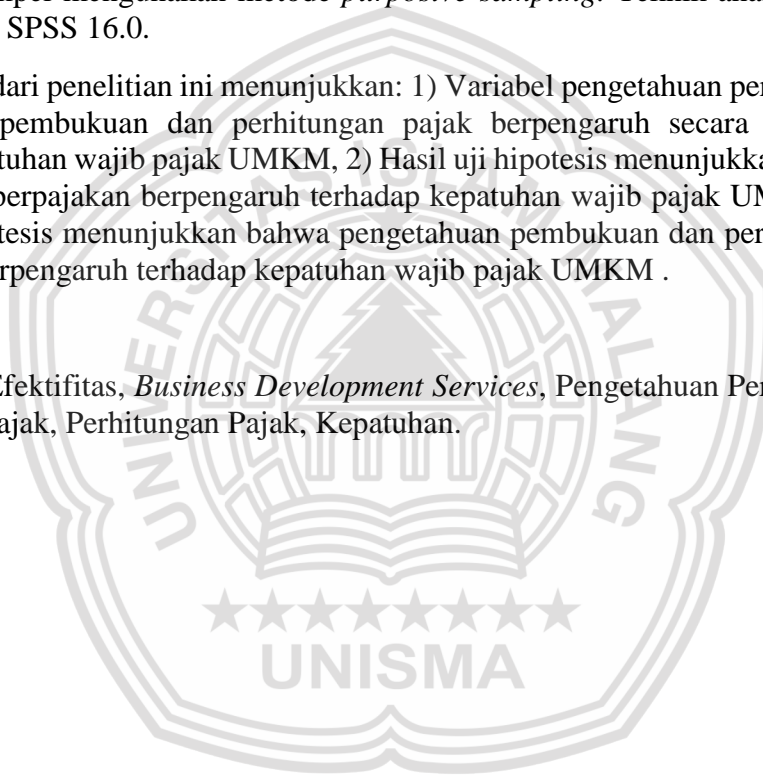
2022

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Business Development Services (BDS) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuisioner dan diukur menggunakan Skala Likert dan data sekunder diperoleh dari data wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM orang pribadi yang telah menjalankan program Business Development Services (BDS) di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Metode penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan SPSS 16.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Variabel pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 2) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 3) Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .

Kata Kunci: Efektifitas, *Business Development Services*, Pengetahuan Perpajakan, Pembukuan Pajak, Perhitungan Pajak, Kepatuhan.

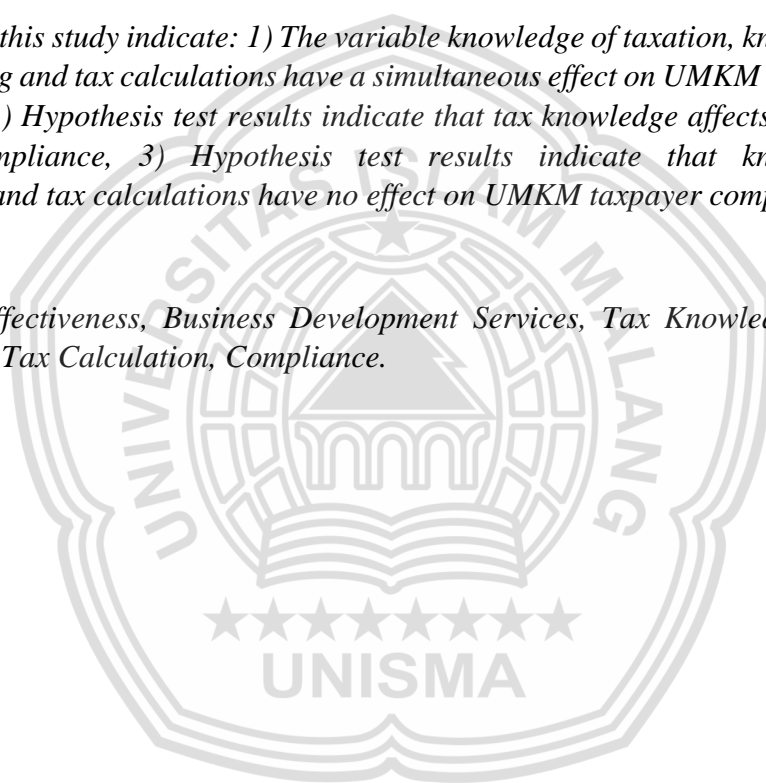


ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Business Development Services (BDS) on taxpayer compliance. This research is a quantitative research using two types of data, namely primary data and secondary data. Primary data obtained from questionnaires and measured using a Likert scale and secondary data obtained from taxpayer data in the working area of KPP Pratama Batu. The population in this study are individual UMKM taxpayers who have run the Business Development Services (BDS) program in the work area of KPP Pratama Batu. The method of determining the sample using purposive sampling method. The data analysis technique used SPSS 16.0.

The results of this study indicate: 1) The variable knowledge of taxation, knowledge of bookkeeping and tax calculations have a simultaneous effect on UMKM taxpayer compliance, 2) Hypothesis test results indicate that tax knowledge affects UMKM taxpayer compliance, 3) Hypothesis test results indicate that knowledge bookkeeping and tax calculations have no effect on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Effectiveness, Business Development Services, Tax Knowledge, Tax Bookkeeping, Tax Calculation, Compliance.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek penting dalam perkembangan negara begitu juga di negara Indonesia. Setiap menjalankan perkembangan negara seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, sistem pemerintahan tentunya membutuhkan berbagai aspek penunjang keberhasilan dan salah satunya adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan tersebut dikarenakan pajak memberikan sumbangsih terbesar bagi pemasukan suatu negara. Tentunya banyak sekali manfaat pajak untuk masyarakat namun hal itu tidak bisa dinikmati secara langsung pada hari yang sama saat wajib pajak membayarnya`

Rasio kepatuhan wajib pajak (WP) pada tahun 2020 dikatakan meningkat dikarenakan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimana Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pada 2020 sebanyak 14,76 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah WP yang wajib memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Namun demikian, rasio Kepatuhan WP meleset dari yang ditargetkan sebesar 80%. (Realisasi Pendapatan Negara Turun 15,1% per November 2020) Realiasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target 2020 yang sebesar Rp 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini turun 19,71% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari PPh sebesar Rp 593,85 triliun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nandiroh, (2021) menjelaskan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan dibuktikan dengan masih rendahnya realisasi penerimaan

pajak dari yang telah ditargetkan. Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di setiap negara, dan terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari setiap individu itu sendiri dimana faktor tersebut berhubungan erat dengan karakteristik setiap wajib pajak yang merupakan salah satu pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, lain halnya dengan faktor eksternal yang memang berasal dari luar diri wajib pajak salah satunya adalah faktor lingkungan. Namun Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong atas rendahnya kepatuhan wajib pajak. Husaini, (2015) menyatakan bahwa masih rendahnya *tax ratio* di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, hal itu tidak sebanding dengan tingkat perkembangan usaha di Indonesia terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM salah satu usaha yang menguasai sektor perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia hingga tahun 2019 mencapai sebesar 65 juta unit dan diperkirakan berkontribusi sebesar 60% atau mencapai sekitar 15.832,5 triliun di tahun 2019 (*Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Kemenkopukm.Go.Id*). Anggota komisi XI DPR Indah Kurnia menyatakan bahwasanya betapa pentingnya peran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hal tersebut sangat membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mengisi kas negara melalui pembayaran pajak Setiawan, (2021). Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran penuh oleh pelaku UMKM terkait kepatuhan perpajakannya.

Penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Banyaknya faktor-faktor yang menghambat para wajib pajak UMKM sehingga menyebabkan mereka lalai akan kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut diantaranya kebanyakan diantara mereka tidak paham secara rinci mengenai administrasi perpajakan, kesusahan pembuatan laporan keuangan serta terabaikannya pengelolaan keuangan dimana hal tersebut merupakan hal yang menjadikan rendahnya kepatuhan wajib pajak Siregar, (2019). Kebanyakan karakteristik yang dimiliki oleh UMKM di Indonesia adalah mereka hanya memikirkan keuntungan yang menjadi prioritas utama tanpa memikirkan ketidakpastian pasar, pembukuan serta laporan keuangan bahkan informasi akuntansi yang seharusnya dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan menyebabkan kurangnya pemahaman dan kewajiban dalam menjalankan perpajakannya.

Banyak akibat yang terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah akan menghilangkan potensi pendapatan negara. Dimana pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, jika tingkat kepatuhan sangat rendah otomatis pajak sebagai sumber pendapatan negara pun akan mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi sangat *berimpact* besar bagi Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang, yang sangat membutuhkan berbagai dukungan dari berbagai sektor salah satunya dari sektor pajak Sinaga, (2016)

Pemerintah terus berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya dengan diadakannya program Direktorat Jendral Pajak (DJP) yakni *Business Development Services* (BDS) melalui program ini pemerintah berupaya mengembangkan bisnis UMKM dengan berbagai kegiatan. Program ini merupakan bentuk strategi inisiatif dari DJP untuk menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *End-to-End* Sutarman, (2020). Sesuai yang tertera dalam surat edaran Direktur Jendral Pajak (DJP) nomor SE-13/PJ/2018 bahwa Program *Business Development Services* adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. Dimana materi yang terdapat dalam program *Business Development Services* ini adalah sebuah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM yang berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para UMKM. Tidak lain tujuan dibentuknya program ini ialah meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM, edukasi pajak guna meningkatkan kesadaran pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak segmen wajib pajak tersebut Herdana, (2021).

Pengetahuan tentang perpajakan, pengetahuan pembukuan, dan perhitungan pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap patuh. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya Sari

Wijaya, (2019) . Sedangkan pembukuan tertuang dalam pasal 1 angka 26 UU KUP menyebutkan bahwa pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dari mulai harta hingga penyerahan barang atau jasa dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi. Perhitungan pajak itu sendiri merupakan hal penting saat melakukan pembukuan karena laporan keuangan komersial yang dihasilkan dari pemahaman akuntansi nantinya diperlukan untuk menghitung jumlah pajaknya Ramdan, (2017).

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran *Business Development Services* (BDS). Penelitian yang dilakukan oleh (Hardiyanti, 2020) menunjukkan bahwa faktor perencanaan dan faktor pengembangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, sedangkan faktor pelaksanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu menunjukkan bahwa *Business Development Services* (BDS) berperan dalam kepatuhan para wajib pajak UMKM meskipun ada variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Program *Business Development Services* (BDS) memiliki dua aspek. Pertama jika ditinjau dari aspek operasional, program yang menyediakan layanan pengembangan usaha guna meningkatkan perusahaan, kemampuan bersaing yang bersifat *non financial* dan berfokus pada kebutuhan UMKM itu sendiri dan yang

kedua adalah aspek kelembagaan dimana berfungsi sebagai pemberi layanan pengembangan bisnis dan dapat melakukan pendampingan serta membantu UMKM Imamah, (2008). Dengan adanya dua aspek tersebut sangat membantu para UMKM untuk lebih berkembang dan lebih memahami terkait pembukuan, pencatatan serta administrasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Efektifitas Pelaksanaan *Business Development Services* (BDS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pembukuan dan penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
2. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?
3. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?

4. Apakah *Business Development Services* (BDS) dari proxy penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan, pembukuan dan penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu
2. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan pembukuan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Business Development Services* (BDS) dari proxy penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mendapatkan ilmu serta pengetahuan dan wawasan baru mengenai program *Business Development Services* (BDS) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk menambah pengetahuan tentang efektifitas *Business Development Services* (BDS)

c. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Diharapkan lebih memperluas topik permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian lebih lanjut mengenai program *Business Development Services* (BDS).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Penelitian ini dapat memberi ilmu baru bagi para pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan bisnisnya sehingga mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakannya

b. Bagi Entitas

Sebagai bahan pertimbangan guna memperbaiki program kerja *Business Development Services* (BDS) sehingga terjadi

peningkatan yang membuat para wajib pajak lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan dimana ketiga variabel independen yakni pengetahuan perpajakan, pengetahuan pembukuan dan perhitungan pajak dapat mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
2. Variabel *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
3. Variabel *Business Development Services* (BDS) dari proxy pengetahuan pembukuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.
4. Variabel *Business Development Services* (BDS) dari proxy perhitungan pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Program *Business Development Services* (BDS) masih tergolong program baru, sehingga kurang maksimal dalam menjalankan penelitian.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.
4. Pengukuran variabel menggunakan skala likert 4 point

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Menambah periode data terkait Program *Business Development Services* (BDS)
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian KPP yang berlokasi di Malang Raya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan dan menggunakan variabel faktor pengembangan (Hardiyanti, 2020).
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan skala likert 5 point agar memberi kesempatan responden menjawab netral.
5. Bagi Direktorat Jenderal Pajak agar lebih menambah waktu sosialisasi tentang *Business Development Services* (BDS) sehingga lebih memahami terkait pembukuan, pencatatan dan perhitungan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina, D. (2014). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pengetahuan Pembukuan, dan Peran Account Representative Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus di KPP Pratama Tigaraksa)*.
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan program IBM SPSS 21*. Cet. Ke VIII. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Grafindo Persada Jakarta 2003.
- Hardiyanti, R. E. (2020). *Pengaruh Program Business Development Services Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Metro Studi Kasus Pada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro*. <http://eprints.ummetro.ac.id>
- Herdana, S. A. (2021). *3 Tahapan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak UMKM, Apa Saja?* DDTC NEWS.
- Husaini, P. R. D. A. S. K. A., & (PS. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. *Perpajakan.Studentjournal.Ub.Ac.Id*, 6(2).
- Imamah, N. (2008). *Peranan Business Development Service dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Wedoro Centre Waru Sidoarjo*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 10(2), 169–176.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - kemenkopukm.go.id*. (n.d.). Retrieved October 9, 2021, from <https://kemenkopukm.go.id/>
- Pajak, D. J. (2018). Surat Edaran. *Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Business Development Services (BDS)*.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rajiyem, P. N. dan. (2020). *Komunikasi Pemerintah Dalam Penyuluhan Perpajakan (Studi Kasus pada Program Business Development Services (BDS) di KPP Pratama Surakarta Tahun 2018-2019)*.
- Ramdan, A. N. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan*

Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 53(9), 1689–1699.

Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus.*

Sari Wijaya, D. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus di Kampung Melayu Barat).*

Setiawan, D. A. (2021). *UMKM Perlu Melek Pembukuan Agar Rutin Setor Pajak.* DDTDC NEWS.

Setiyono, J. (2020). *Program Business Development Services: Upaya Nyata DJP Bangkitkan UMKM / Direktorat Jenderal Pajak.* Pajak.Go.Id.

Sinaga, N. A. (2016). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di indonesia.* 7(1), 142–157.

Siregar, I. N. (2019). *Analisis Penerapan Siklus Akuntansi Pada Usaha Tahu Desa Marga Mulya.*

Sutarman, A. H. (2020). *Implementasi Strategi Komunikasi Kanwil DJP Jawa Barat I Melalui Program Business Development Services (BDS).*

Nandiroh, Umi (2021). *Sosialisasi Dan Edukasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Program Relawan Pajak.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2017). Ojk.Go.Id.

